

**PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA
DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAANNYA
(Studi Desa di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURJIDAH

10800112031

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurjidah
Nim : 10800112031
Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang / 26 Juli 1994
Jurusan / Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : BTN agraria blok T no. 8
Judul : “Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendahara
Desa dan tantangan dalam Pelaksanaannya (Studi
Desa di Kecamatan Barombong Kabupaten
Gowa)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, Maret 2017
Penulis,

NURJIDAH
NIM : 10800112031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pemahaman Perpajakan Bendahara Desa dan tantangan dalam Pelakasaannya (Studi Kasus Desa di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa”**, yang disusun oleh **Nurjidadh**, NIM: **10800112031**, mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2017, bertepatan tanggal 3 Rajab 1438 Hijriah dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.


Makassar, 31 Maret 2017

3 Rajab 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Syaharuddin, M.Si.	(.....)
Penguji II	: Saiful, SE., M.SA., Ak	(.....)
Pembimbing I	: Mustakim Muchlis, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Efendi, SE., MM	(.....)

Diketahui Oleh,
/Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
/UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah (Subhanahu Wata'ala) yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan inayahnya serta ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenan-Mu jualah sehinggapenulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad” juga penulis sampaikan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya.

Skripsi judul **“Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan tantangan dalam Pelaksanaannya di Desa Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”** dapat diselesaikan diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang diharapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda H.Sabaruddin Garancang dan ibunda HJ. ST. Hidayah yang sungguh aku tak mampu membalasnya, baktiku pun tak akan pernah bisa membalas setiap hembusan kasih, luapan cinta, yang

mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Madjid, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEBI UINAM beserta stafnya.
4. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi FEBI UINAM.
5. Bapak Mustakim Muchlis, SE., M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta motivasi yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Efendi, SE., M.M., selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta motivasi yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak /Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Bapak Bupati Gowa dan segenap staf Pemerintah Kabupaten Gowa, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.
9. Bapak Camat Barombong beserta staf Kecamatan Barombong, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.
10. Bapak Desa Biringala beserta staf Desa Biringala, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.
11. Kakakku NurAkmal, Nurdiyanti dan Adikku Nurimah, Nuradilah, Nurafif, yang selalu memberikan motivasi dan semangat akan terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat terbaik layaknya saudara, Nur Azizah Pratiwi, Nur Azizah Azis, Nisrina, Khairunnisa, Laksmi Nurawaliah, Rysna Anisah, Sri Mulidya yang telah memberikan begitu banyak pengalaman hidup kepada penulis, dan yang lebih penting mengajarkan arti “persahabatan” yang sesungguhnya. Terima Kasih ☺
13. Sahabatku Tiwi, terima kasih sudah bersedia menemani penulis berkelana pada saat penelitian dan terima kasih atas segala dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.

14. Saudara-saudaraku, Akuntansi UINAM 2012 kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan kan slalu teringat, semoga persahabatan dan perjuangan kita belum sampai disini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan.
15. Teman-teman KKNP suka dan duka telah kita alami bersama tidak akan pernah terlupakan dan seluruh pegawai Balai Diklat Keagamaan terima kasih atas bimbingan selama proses KKNP berlangsung.
16. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dan pengertian secara tulus.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Makassar, 20 Maret 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. <i>Stewardship Theory</i>	12
B. <i>Theory of Planned Behavior</i>	13
C. Perspektif Ekonomi Syariah tentang Pajak.....	15
D. Bendahara Pemerintah.....	18
E. Kewajiban Bendahara Pemerintah	19
F. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Informan Penelitian	46
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	47
H. Pengujian Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa	60
C. Kendala pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Desa.....	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi Penelitian	81
KEPUSTAKAAN	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.1 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21	25
Tabel 2.2 Jasa Objek PPh Pasal 23	27
Tabel 2.3 Objek dan Tarif Bea Meterai	34
Tabel 2.4 Batas Waktu Pelaporan dan Penyetoran SPM	37
Tabel 4.1 Ibu Kota Kecamatan	53
Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk	57
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk	59
Tabel 4.4 Daftar Honorarium Tim	62
Tabel 4.5 Daftar Penghitungan Honorarium PPh Pasal 21	63

ABSTRAK

NAMA : NURJIDAH

NIM : 10800112031

**JUDUL : PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA
DESA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAANNYA
(STUDI DESA DI KECAMATAN BAROMBONG, KABUPATEN
GOWA)**

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pemahaman kewajiban perpajakan bendahara desa di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan tujuan mendeskripsikan pemahaman kewajiban perpajakan bendahara desa dan melihat faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Desa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di desa dan meningkatkan pemahaman pajak Bendahara Desa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi, dan *internet searching*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kewajiban perpajakan bendahara di Desa Biringala Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa telah sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku. Namun masih ada faktor penghambat bendahara dalam pemotongan/ pemungutan pajak kepada pihak penyedia barang/ jasa (Pengusaha).

Kata Kunci: Bendahara Pemerintah (Desa), Pemahaman, Pemotongan Pajak, Pemungutan Pajak.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar adalah pajak. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam membiayai negara menuntut peningkatan penerimaan negara salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Postur APBN tahun 2017 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Tahun 2017, besaran pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp1.737,6 triliun yang berarti turun 2,7 persen dari target nya pada APBNP tahun 2016. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp.1.495,9 triliun atau turun 2,8 persen dari tagetnya dalam APBNP tahun 2016.

Untuk mencapai target penerimaan pajak negara, Fiskus melakukan berbagai upaya melalui dua cara yaitu eskensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi dengan cara peningkatan

kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum (Herryanto, 2013). Hal ini tentu diperlukan partisipasi masyarakat dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak.

Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan agar target penerimaan perpajakan tercapai, yaitu : (1) kebijakan optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan *tax ratio* dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN, (2) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional, (3) kebijakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri, (4) kebijakan yang diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan *negative externality*, (5) kebijakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), (6) kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan mendukung era transparansi informasi dibidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak, dan (7) kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang memiliki wewenang mengoptimalkan penerimaan dalam sektor perpajakan telah melakukan upaya agar penerimaan dari sektor perpajakan semakin meningkat. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak mulai ditingkatkan dengan mencari sumber-sumber wajib pajak baru dan sumber-sumber pajak konvensional yang selama ini kurang

tertangani antara lain pajak-pajak penghasilan yang pemotongan/pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan dan juga pengoptimalan peran bendaharawan sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bendahara Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Bendahara Pemerintah sebagai pemegang kas mempunyai kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Bendahara Pemerintah di haruskan mengetahui dengan benar ketentuan perpajakan terutama mengenai kewajiban melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai (Bawono dan Novelsyah, 2012).

Besarnya target pemerintah terhadap penerimaan perpajakan secara tidak langsung menuntut peran serta bendahara pemerintah agar dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pemotong dan pemungut bagi PPh maupun PPn. Bendahara pemerintah baik

sebagai bendahara pengeluaran maupun bendahara pembantu pengeluaran harus memahami dengan benar kapan suatu transaksi harus dikenakan pajak, jangan sampai transaksi yang seharusnya dikenakan pajak tidak dikenakan begitu pula sebaliknya.

Pemahaman bendahara pengeluaran ataupun bendahara pembantu pengeluaran merupakan salah satu faktor kunci yang dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pajak.go.id ternyata banyak sekali aparat desa yang belum memahami perpajakan, demikian pula dengan para pelaku usaha yang menjadi rekanan. pemahaman tentang perpajakan bendahara belum cukup mengoptimalkan potensi penerimaan pajak karena bendahara juga sering kesulitan ketika akan melakukan pemungutan pajak saat melakukan transaksi pembelian barang pihak yang bersangkutan tidak mau dikenakan pajak, dan masih banyak desa yang melaksanakan pembangunan dimana sistem pembayaran tenaga kerjanya menggunakan cara upah harian. Hal demikian merepotkan mereka menghitung PPh 21 tenaga kerja tersebut. Selain itu, masih banyak rakyat yang belum sepenuhnya sadar dan menganggap pajak sebagai biaya atau pengeluaran padahal sesungguhnya pajak itu bukanlah biaya bukan juga pengeluaran tetapi sebagai sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan fenomena tersebut masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan padahal telah di jelaskan pada QS. An-Nisa 4: 59 mengenai makna ketaatan pada *ulil amri*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
 نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya; *Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah* dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an *dan taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, *dan* perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *di antara kamu* wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah ataupun perintah Rasul-Nya. *Maka jika kamu tarik-menarik*, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur’an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, *maka kembalikanlah ia kepada*

nilai-nilai dan jiwa firman *Allah* yang tercantum dalam al-Qur'an, serta nilai-nilai *dan* jiwa tuntunan *Rasul* saw.yang kamu temukan dalam sunnahnya, *jika kamu benar-benar beriman* secara mantap dan bersinambung *kepada Allah dan hari kemudian*. Yang demikian *itu*, yakni sumber hukum ini adalah *baik* lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, *dan* disamping itu, ia juga *lebih baik akibatnya*, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak (Shihab, 2002). Jadi, perintah untuk membayar pajak yang telah diatur oleh Negara merupakan seruan yang mensyaratkan kita untuk mematuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melihat pemahaman bendahara terkait kewajiban perpajakan di Desa Biringala Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dan peneliti juga ingin melihat apa saja tantangan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara di desa. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini ***“Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Tantangan dalam pelaksanaannya (Studi Kasus Desa di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa)”***

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah pemahaman kewajiban perpajakan bendahara desa dan tantangan dalam pelaksanaannya yang berada di Gowa Kecamatan barombong. Adapun kewajiban perpajakan bendahara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Penelitian ini bermaksud melakukan kajian secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Desa Biringala yang berada di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

Dipilihnya Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Dalam penelitian ini, dengan alasan karena desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi target penerimaan pajak negara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman bendahara desa terkait kewajiban perpajakan?
2. Kendala-kendala apakah yang menjadi penghambat bendahara desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat pelaksanaan kewajiban Perpajakan Bendahara berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007. Penelitian terdahulu mengenai Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah akan menjadi pedoman dalam penelitian ini, Adapun hasil dari penelitian sebelumnya, yaitu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
Mustakim Muchlis, 2015	Kewajiban Pajak Bendahara Pemerintah : Tantangan	Pemahaman bendahara pemerintah dalam hal bendahara pembantu pengeluaran di lingkup UIN Alauddin Makassar terkait pemotongan dan

	dalam penerapannya	<p>pemungutan pajak telah memadai. Kewajiban perpajakan terkait pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai telah dijalankan dan telah dipahami kapan harus dipotong dan dipungut. Adapun yang menjadi tantangan ketika transaksi dilakukan pada pihak rekanan yang baru pertama kali ditempati bertransaksi dan transaksinya tidak direncanakan sebelumnya.</p> <p>Pada Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.</p>
Kiki, Nurul (2012)	Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahrawan Pemerintah	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan mulai pada pertengahan bulan Mei sampai dengan akhir bulan April 2011. Bentuk ketidaksesuaian tersebut antara lain: (1) masih terdapat Bendaharawan yang tidak kompeten, (2) tidak ada kemauan untuk belajar, (3) tidak memperbarui ketentuan perpajakan yang berlaku, (4) tarif 2% menjadi 4% pada pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan, (5) jumlah penghasilan neto 100% menjadi 95%, (6) persamaan pemotongan tarif untuk honorarium antara PNS yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP, (7) penggelembungan nilai minimal yang ditetapkan untuk dasar pemungutan PPN.</p>

		<p>Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketidaksesuaian tarif pemotongan dan pemungutan pajak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Adapun faktor-faktor yang dapat teridentifikasi adalah ketidakpahaman bendaharawan dalam pemotongan dan pemungutan pajak serta kesengajaan untuk mengurangi atau menambahkan tarif dalam pemotongan dan pemungutan yang dilakukan Bendaharawan untuk maksud dan tujuan tertentu.</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif</p>
Marisa, Agus (2013)	<p>Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.</p>	<p>Hasil pengujian bahwa asumsi klasik tahap pertama didapat bahwa telah terjadi masalah multikolinieritas dalam model regresi. Oleh karena itu diambil langkah untuk mengeluarkan variabel jumlah Wajib Pajak sebagai variabel multikolenieritas, sehingga hanya tiga variabel.</p> <p>Hasil variabel pemeriksaan pajak secara parsial menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.</p> <p>Hasil pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.</p> <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan ulasan rumusan masalah diatas, maka saya uraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman bendahara desa terkait kewajiban perpajakan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang menjadi penghambat bendahara desa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari peneltian ini di harapkan akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi dimana dapat mengetahui tentang pentinngya pemahaman perpajakan dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu bahwa ilmu merupakan pedoman kita dalam melakukan kegiatan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan juga masyarakat.

b. Manfaat Praktis**1) Bagi Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti sangat bermanfaat untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan bendahara pemerintah dan tantangan pelaksanaannya.

2) Bagi Pembaca

Peneliti mengharapkan para pembaca untuk mengetahui bagaimana tatacara pemungutan pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Stewardship Theory*

Menurut (Donadson dan James, 1991), *stewardship theory* yang menggambarkan situasi dimana para manajemen organisasi tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Manajemen (*agent*) sebagai *steward* akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, dalam hal ini dapat diartikan pejabat desa dengan rakyat. Teori ini mengamsumsikan bahwa adanya hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Menurut (Raharjo, 2007) *stewardship theory* manajer atau pejabat desa akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan *principals* tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku

principals merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* akan melihat pada usaha dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan diberikan kewenangan kepada Bendahara Pemerintah (Pejabat Desa) dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang dana nya bersumber dari APBN/APBD dimana bendahara berperan sebagai *steward* lebih mengutamakan kepentingan *principals*. Dengan hal itu *stewardship theory* berperan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sistem tersebut, yang dimana kepentingan organisasi merupakan kepentingan bersama.

B. Theory of Planned Behavior

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991).

Kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak

dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi (Feld and Frey, 2002). Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak dan otoritas pajak dan keberhasilan pemungutan pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi ini.

Pajak, walaupun dapat dipandang dari sisi kontrak psikologi di atas, namun menurut (Allingham and Sandmo, 1972) mengemukakan bahwa keputusan individu untuk melaksanakan kepatuhan pajak didasari oleh keputusan yang rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi individu itu sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas pemerin-tah untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat.

Berdasarkan model TPB dalam (Ajzen, 1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

C. Perspektif Ekonomi Syariah tentang Pajak

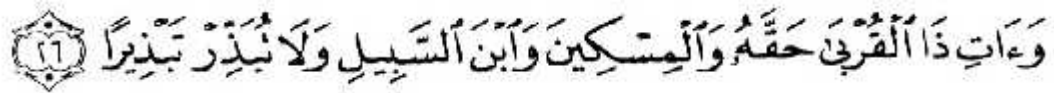
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yaitu pungutan yang diambil dari rakyat oleh pemungut pajak yang biasa disebut *Shahibul Maks* atau Al-Asysyar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, persentasenya mencapai 88% dan bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia (Kholis, 2010). Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena terdapat undang-undang yang mewajibkan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai ketentuan undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang ini, (Kholis, 2010) mengungkapkan bahwa terdapat di

kalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat.

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. (Kholis, 2010) menyebutkan salah satu hadis dalam makalahnya yang berbunyi, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab, “Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah” (HR Bukhari dan Muslim). Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Berdasarkan dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain yaitu pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain (Gusfahmi, 2007: 169). Menurut (Kholis, 2010) diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.

Dalam Islam telah di jelaskan dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Isra 17: 26:



Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang fakir dan miskin mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang kaya. Sebab pada setiap harta seseorang terdapat milik orang lain. Karena secara tidak langsung harta yang dimiliki merupakan hasil bantuan orang lain. Memberi kepada orang lain merupakan perbuatan yang sangat mulia karena dapat meringankan beban orang lain, sementara menghambur-hamburkan harta merupakan perbuatan yang sangat tercela. Oleh sebab itu, sebagai warga Negara kita diwajibkan untuk membayar pajak guna keperluan orang banyak. Meskipun dalam Al-Qur'an melarang praktik pajak, tapi sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk menaati pemimpin selama perintah dari pemimpin tersebut adalah bukan kemaksiatan, maka kita wajib untuk menaatinya. Rasulullah saw juga berwasiat kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulullah kemudian berpesan agar menaati pemimpin.

D. Bendahara Pemerintah

Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014 mendefinisikan bendahara secara umum dikenal sebagai orang yang memegang uang baik di perusahaan swasta, sebuah organisasi, maupun di instansi-instansi pemerintah. Bendahara yang dimaksud pada tulisan ini adalah bendaharawan pemerintah. Sesuai Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Sedangkan bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kantor atau satuan kerja kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah.

Bendahara pemerintah yang memiliki tugas melakukan pemotongan dan pemungutan pajak meliputi:

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga Lainnya yang mengeluarkan dana yang berasal dari APBN/APBD,

2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP),
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

E. Kewajiban Bendahara Pemerintah

Bendahara Pemerintah yang mengelola dana APBN/APBD diwajibkan :

1. mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak,
3. Melaksanakan penyetoran atau pembayaran pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan
4. Melaksanakan pelaporan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Proses pendaftaran NPWP, sebagai berikut;

1. Pendaftaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat;
2. Mengisi formulir pendaftaran,
3. Melampirkan fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai bendaharawan,

4. Melampirkan fotocopy kartu tanda pengenal (KTP/SIM) bendaharawan yang bersangkutan.

Setelah bendaharawan mendapatkan NPWP, selanjutnya bendaharawan dapat bertindak sebagai pemotong/pemungut pajak-pajak negara. Setiap hasil pemotongan/pemungutan pajak disetorkan melalui kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak digunakan sebagai bukti pembayaran masing-masing jenis pajak, sehingga secara teknis penyetoran antara PPN dengan PPh yang lain tidak boleh digabungkan dengan satu SSP. Demikian juga dengan jenis pajak penghasilan harus dipisahkan satu sama lain, karena masing-masing memiliki kode akun pajak dan kode jenis setoran yang berbeda.

Setelah membayarkan hasil pungutan/potongan pajak bendaharawan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak yang terutang melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan. Surat pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT

berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. SPT terdiri atas 2 yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Melakukan Pemotongan dan Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai

Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai adalah pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai.

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur (Kiki dan Nurul, 2012). pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/ jasa/ kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

a. Dasar Pengenaan PPh

Dasar pengenaan PPh atas penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dengan cara mengurangi jumlah penghasilan netto dengan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan penghasilan netto dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah biaya jabatan maksimal Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun.

2. Pegawai Tidak Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut:

- a) Dalam hal penghasilan bruto yang dibayar bulanan telah melebihi Rp 4.500.000,00 dalam sebulan, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- b) Dalam hal penghasilan bruto sehari atau penghasilan bruto rata-rata sehari telah melebihi Rp 450.000,00 namun akumulasi penghasilannya dalam sebulan kurang

dari Rp 4.500.000,00 dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah sebesar Rp 450.000,00.

- c) Penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari lebih dari Rp 450.000,00 atau akumulasi penghasilannya dalam sebulan telah lebih dari Rp 4.500.000,00, tetapi tidak lebih dari Rp 10.200.000,00, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP harian sejumlah hari kerja yang sebenarnya.
- d) Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.
- e) Sedangkan atas penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp 450.000,00 dan akumulasi penghasilannya dalam sebulan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

3. Bukan Pegawai

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai adalah sebagai berikut:

- a) Bukan Pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan. Yang dimaksud dengan penghasilan bersifat berkesinambungan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari satu bendahara pemerintah dalam satu tahun pajak lebih dari satu kali. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang diterima atau

diperoleh Bukan Pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. PTKP tersebut dapat diberikan sepanjang orang pribadi yang bersangkutan (Bukan Pegawai) telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21.

- b) Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

b. Tarif PPh

Tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh yang tidak bersifat final, sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

2. Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang.

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

- a. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- b. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:

$$1,5\% \times \text{harga beli (tidak termasuk PPN)}$$

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila:

- a. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp 2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
- b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM dan benda-benda pos; dan

- c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 yaitu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

- a. sewa dan penghasilan (PPh) lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

Tabel 2.2

Jasa lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23

1. Jasa penilai (<i>appraisal</i>),	13. Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi,
2. Jasa aktuaris,	14. Jasa maklon,
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan,	
4. Jasa perancang (<i>design</i>),	
5. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara,	
6. Jasa penebangan hutan,	
7. Jasa pengolahan limbah,	
8. Jasa penyedia tenaga kerja (<i>outsourcing services</i>)	
9. Jasa perantara dan/atau	

<p>keagenan,</p> <p>10. Jasa kustodian/ penyimpangan/ penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI,</p> <p>11. Jasa sehubungan dengan <i>software computer</i>, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan,</p> <p>12. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi,</p>	<p>15. Jasa penyelenggaraan kegiatan/ <i>Event Organizer</i>,</p> <p>16. Jasa pengepakan,</p> <p>17. Jasa penyediaan tempat dan/ atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi,</p> <p>18. Jasa pembasmian hama,</p> <p>19. Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i>,</p> <p>20. Jasa <i>catering</i> atau tata boga.</p>
--	---

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas royalti dan hadiah/penghargaan;
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

4. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:

a. Persewaan tanah dan/atau bangunan

- 1) Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan, industri.
- 2) Besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
- 3) Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan *service charge* (baik perjanjian yang dibuat secara terpisah maupun distukan).

b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

- 1) Objek PPh Final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar menukar, perjanjian

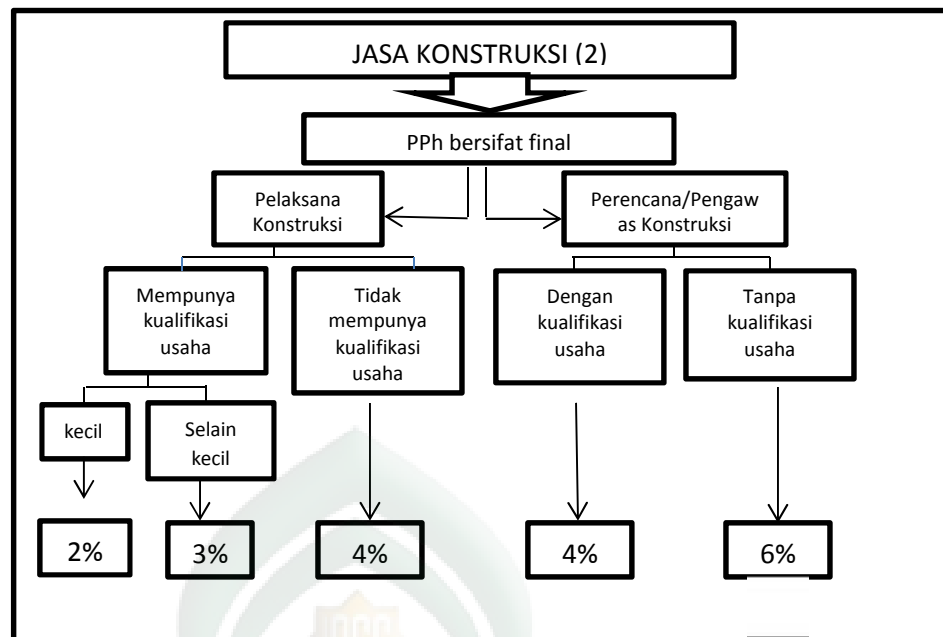
pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.

- 2) Besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 3) Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:
 - a) Orang pribadi yang penghasilannya dibawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp 60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
 - b) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan, air, waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul, penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
 - c) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing).

c. Jasa Konstruksi

- 1) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 2) Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang dapat mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- 3) Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
- 4) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

5) Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi.



5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan. Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*;
- c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- e. pembayaran atas rekening telepon;
- f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
- g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih besar daripada yang seharusnya atau kesalahan pemungutan yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, maka atas kelebihan pembayaran PPN yang seharusnya tidak terutang tersebut dapat dimintakan pengembalian.

Pada prinsipnya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang seharusnya tidak terutang hanya dapat diajukan oleh pihak yang benar-benar menanggung pajak yaitu pihak yang harus menanggung pemungutan pajak tersebut.

Dalam hal PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut oleh bendahara Pemerintah lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut, maka atas kelebihan pemungutan PPN dan/atau PPnBM tersebut hanya dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh bendahara Pemerintah selaku pihak yang dipungut ke KPP tempat bendahara terdaftar.

Sebagai contoh, bendahara telah memungut PPN sebesar Rp 500.000.000 atas transaksi pembebasan tanah senilai Rp 5.000.000.000,00 dari Wajib Pajak orang pribadi yang bukan pengusaha real estate. Berdasarkan ketentuan, atas pembebasan tanah tersebut seharusnya tidak dipungut PPN oleh bendahara. Maka atas PPN yang telah dipungut tersebut, dapat dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang oleh bendahara ke KPP tempat bendahara terdaftar sesuai PMK Nomor 10/PMK.03/2013.

6. Bea Meterai

Bea meterai yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain yaitu dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen yang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjian

pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Tabel 2.3
Objek dan Tarif Bea Meterai

No.	Objek	Tarif
1.	Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan bersifat perdata.	Rp 6.000,00
2.	Akta-akta notaris termasuk salinannya.	Rp 6.000,00
3.	Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.	Rp 6.000,00
4.	Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, <i>billing statement</i> , dll:	
	a. 0 s.d. Rp250.000,00	-
	b. Di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00	Rp 3.000,00
	c. Di atas Rp1.000.000,00	Rp 6.000,00
5.	Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.	Rp 6.000,00
6.	Cek dan Bilyet giro.	Rp 3.000,00
7.	Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun:	
	a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00;	Rp 3.000,00
	b. Harga nominal di atas Rp1.000.000,00.	Rp 6.000,00
8.	Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.	Rp 6.000,00

Bea Materai tidak dikenakan atas;

a. Dokumen yang berupa:

- 1) Surat penyimpanan barang,
- 2) Konosemen,
- 3) Surat angkutan penumpang dan barang,
- 4) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
- 5) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang,
- 6) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim,
- 7) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f.

b. Segala bentuk ijazah,

c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu,

d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank,

e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank,

f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi,

- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut,
- h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian,
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya adalah menyetorkan PPh dan/atau PPN ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Batas Waktu Penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa

Pasal	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
-------	--------------------	-------------------

PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPh Pasal 22	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPh Pasal 4 ayat (2)	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
PPN	<p>a. Bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir,</p> <p>b. Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p>	<p>a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.</p> <p>b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.</p>

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain:

1. Apabila batas akhir pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya,
2. Apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya,
3. Pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
4. Dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan,
5. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN),
6. Peran bendahara sebagai pihak Pemotong dan Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi

atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

7. Bendahara sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) setelah tahun kalender berakhir,
8. Bendahara sebagai pemungut PPh melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan,
9. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib menggunakan e-SPT apabila jumlah bukti pemotongan atau SSP dan bukti Pbk lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak,
10. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) wajib membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/ Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). DTH yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir dengan dilampiri fotocopy SSP lembar ke 3,
11. Kuasa BUD membuat Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) yang memuat rekapitulasi dari DTH yang dalam satu wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan DTH yang disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran SKPD. RTH disampaikan kepada kepala KPP tempat Kuasa BUD terdaftar secara bulanan paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir dengan dilampiri DTH dan SSP lembar ke-3. Dalam pembuatan laporan DTH/RTH, bendahara SKPD maupun Kuasa BUD dapat memanfaatkan sistem informasi yang digunakan oleh pemda (SIMDA, SIPKD, SIMAKDA dan lain-lain).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci (Indriantoro dan bambang, 2013). Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena ada dua alasan yaitu dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan kontekstual dan pemulihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya.

Penelitian ini akan menghasilkan pemahaman kewajiban perpajakan bendahara desa dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di desa Biringala Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Fenomenologi*. *Fenomenologi* mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena, pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi. Dipilihnya pendekatan

tersebut yaitu karena memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri Dengan memahami suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan.

Sebagaimana dalam penelitian ini menginterpretasi apa yang dipahami bendahara desa tentang pemahaman pajak, yang mana untuk mengklasifikasikan implementasinya pada desa yang ada di kecamatan Barombong, maka dibutuhkan pedoman dalam pemaknaannya yang berhubungan dengan bentuk pertanggungjawaban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data data sekunder. Data primer merupakan data yang diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang teliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan bendahara desa serta dokumen-dokumen yang meliputi monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) terhadap suatu objek secara langsung sebagai informan penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung.

Informan adalah orang yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2011: 132) pada penelitian ini menggunakan beberapa informan yang akan memberikan informasi yang mengetahui tentang pemahaman ketentuan perpajakan. Informan dalam penelitian ini adalah Desa Biringala di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Informan ini dipilih karena dianggap telah menjabat sebagai bendahara desa dan telah memiliki pengalaman.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam, Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self – report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. Misalnya mengenai sejarah dari Desa di Kecamatan Barombong.
3. Studi Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial dan ekonomi pemerintah desa yaitu laporan pertanggungjawaban yang didalamnya yang mengandung narrative text, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai praktik sosial dan ekonomi
4. *Internet searching* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet

guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau (Basrowi dan Suwandi, 2008: 86). Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka cross check data. Adapun data informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Aisyah	Kantor Desa Biringala	Bendahara
2.	Nasrullah	Toko Jaya Baru	Owner

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, observasi hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun alat-alat penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu :

1. Buku catatan
2. Handphone
3. Kamera
4. Alat tulis
5. Daftar pertanyaan wawancara
6. Buku, jurnal, referensi lainnya.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan internet *searching* yang membantu dalam pengolahan data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah didapat dengan coding, yaitu memberi kode pada tiap satuan data agar nantinya data tersebut tetap dapat ditelusuri satuannya (Moleong, 2011:288). Selanjutnya adalah penyusunan dalam satuan yang kemudian dikategorikan pada langkah berikut. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Menurut Salim (2006) dalam Saputro, (2014) proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan

- pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahapan penyajian yaitu tahap Kelas dan tahap kritik. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan data yang memiliki hubungan dengan profesionalisme dengan macam karakter pemerinta desa dan diakhiri dengan merumuskan alat analisis yang digunakan untuk menganalisa objek kritik, yaitu Tahap evaluasi/kritik. Tahap ini dilakukan untuk mengkritisi konsep yang digunakan pemerintah desa. Dalam menyampaikan kritiknya, peneliti akan berpedoman suatu pemikiran.
 3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian yang dapat dilakukan melalui empat uji, yaaitu dengan *uji credibility* (validitas internal), *transfertability* (validitas eksternal), *dependability* (reliability) dan *confirmatability* (obyektivitas)

(Sugiyono, 2013: 270). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dalam satu uji yang paling sesuai, yaitu *uji credibility* (validitas internal). Uji validitas internal adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin dalam Rahardjo (2010) adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut Denkin dalam Rahardjo (2010), triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Sumber data utama yaitu wawancara, peneliti bisa memperoleh sumber data pendukung seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari informan lebih akurat.

- b. Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi yang didapatkan selanjutnya dibandingkan dengan teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan tiga gambaran umum, yaitu gambaran umum Kabupaten Gowa, Kecamatan Barombong dan Desa Biringala.

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi,

Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti

setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar 695.697 jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

Tabel 4.1
Ibu Kota Kecamatan

NO	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1.	Bontonompo	Tamallayang
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang
3.	Bajeng	Kalebajeng
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa
5.	Pallangga	Mangalli
6.	Barombong	Kanjilo
7.	Somba Opu	Sungguminasa
8.	Bontomarannu	Borongloe

9.	Pattallassang	Pattallassang
10.	Parangloe	Lanna
11.	Manuju	Bilalang
12.	Tinggi Moncong	Malino
13.	Tombolo Pao	Tamaona
14.	Parigi	Majannang
15.	Bungaya	Sapaya
16.	Bontolempanga	Bontoloe
17.	Tompobulu	Malakaji
18.	Biringbulu	Lauwa

b. Demografi

Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%.

Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah

Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut.

Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

c. Visi dan Misi Kabupaten Gowa

1) Visi Kabupaten Gowa

Terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2) Misi Kabupaten Gowa

- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai.
- b) Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.
- c) Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.
- d) Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintahan.
- e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan.

2. Gambaran Umum Kecamatan Barombong

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Barombong merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah Utara Kecamatan Pallangga, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar Sebelah Selatan Kecamatan Bajeng dan Kota Makassar Sebelah Barat Kabupaten Takalar dan Kota Makassar sedangkan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bajeng dan Barombong. Curah hujan rata dalam setahun antara 135 hari sampai 160 hari dan ketinggian dari permukaan laut berkisar rata-rata 25 meter. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 7 (tujuh) desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Barombong adalah Kanjilo dengan jarak sekitar 6,5 km dari Sungguminasa merupakan salah satu daerah pertanian dan pengembangan permukiman.

b. Demografi

Penduduk Kecamatan Barombong sebesar 31.717 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 16.553 jiwa dan perempuan sebesar 15.164 jiwa dan sekitar 99,8 persen beragama Islam.

Tabel 4.2
Luas wilayah dan jumlah Penduduk
Menurut Desa di Kecamatan Barombong

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah		Kepadatan Penduduk	Rata- Rata Besarnya Anggota Rumah Tangga
			Rumah Tangga	Penduduk		
1.	Biringala	2,32	581	2.724	1.174	5
2.	Mocobalang	3,54	881	4.135	1.168	5
3.	Tinngimae	3,10	804	4.098	1.322	5
4.	Lembangpara ng	2,38	1016	5.152	2.165	5
5.	Kanjilo	4,21	1172	6.158	1.463	5
6.	Tamanyeleng	3,10	903	4.608	1.486	5
7.	Benteng Sombaopu	2,02	504	4.842	2397	10
	Jumlah	20,67	5.861	31.717	1.534	5

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Barombong

c. Visi dan Misi Kecamatan Barombong

1) Visi Kecamatan Barombong

Terwujudnya Kecamatan Barombong sebagai kawasan utama pengembangan Kecamatan dan termaju di Kabupaten Gowa.

2) Misi Kecamatan Barombong

- a) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat efektif dan efisien.
- b) Peningkatan produktifitas sektor pertanian serta pengembangan agrobisnis produk pertanian yang berdaya saing dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian.
- c) Pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.
- d) Pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kecamatan.

3. Gambaran Umum Desa Biringala

a. Keadaan Geografis

Desa Biringala adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Barombong yang terletak di Ujung Selatan Kecamatan Barombong dengan luas wilayah 278,63 Ha atau 2,79 Km² yang berbatasan :

Sebelah Utara : Desa Moncobalang

Sebelah Timur : Desa Bone Kec. Bajeng

Sebelah Selatan : Desa Kalemendalle Kec. Bajeng Barat

Sebelah Barat : DesaTamasaju/KelurahanBontolebang
Kec.Galesong Utara Kab. Takalar.

Tabel 4.3
Jumlah penduduk

No	Dusun	Penduduk		Jumlah
		LK	PR	
1.	Ballaparang	479	510	989
2.	Bontobila	364	396	760
3.	Biringkanaya	645	679	1324
		1.488	1.585	3073

b. Visi dan Misi Desa Biringala

1) Visi Desa Biringala

Terwujudnya masyarakat Desa yang maju dan makmur didukung oleh pertanian yang unggul dan prasarana transportasi yang memadai.

2) Misi Desa Biringala

- a) Meningkatkan hasil pertanian.
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di segala bidang.
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
- d) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

B. Pemahaman bendahara desa tentang kewajiban perpajakan

Pemahaman kewajiban perpajakan bendahara Desa di Kecamatan Barombong, di Desa Biringala berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang ditemui. Sebagaimana yang kita ketahui pajak mempunyai peranan yang penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia dan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Demi optimalnya penerimaan pajak, pemerintah memberikan wewenang kepada pihak ketiga (*Withholder*) yaitu bendahara pemerintah untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan presentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. Bendahara pemerintah sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diharuskan memahami aspek-aspek perpajakan yaitu mengenai tatacara pemotongan/pemungutan PPh, PPN, dan Bea materai, dan selain itu bendahara pemerintah juga mempunyai kewajiban mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, menyetor dan melaporkan pajak. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, bendahara pemerintah sebagai pihak ketiga yang mempunyai kewajiban memotong, memungut, menyetor dan melaporkan PPh dan PPN wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Aisyah mengatakan bahwa:

“setelah ditunjuk jadi bendahara saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebelum memotong dan memungut pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN...”

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

“..... syaratnya untuk mendapatkan NPWP saya lampirkan KTP, fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan isi formulir kantor pajak”. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Biringala, 6 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aisyah bahwa setelah bendahara ditunjuk untuk menjabat sebagai bendahara diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebelum melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak. Adapun syarat yang harus di ajukan bendahara untuk memperoleh NPWP yaitu dengan menunjukkan KTP, fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak.

Berikut tata cara untuk memperoleh NPWP sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu:

- a. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara tersebut;
- b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

2. Melakukan Pemotongan/ Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai.

Pemotongan PPh Pasal 21/26

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan. Misalnya Kantor yang membentuk tim Peningkatan Mutu Pelayanan yang anggotanya terdiri dari beberapa orang PNS dan Non PNS. Bendahara Kantor membayar honorarium tim dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Honorarium tim

Nama	Golongan	Jabatan	Honorarium
Farianto	IV/a	Ketua	Rp 2.300.000,00
Hartanto	III/c	Wakil Ketua	Rp 2.000.000,00
Yugana	Non PNS	Sekretaris	Rp 1.500.000,00

Bayu	II/d	Anggota	Rp 1.000.000,00
Jumlah			Rp 6.800.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 atas honor anggota tim Peningkatan Mutu Pelayanan yang merupakan PNS didasarkan pada golongan dari penerima honor sebagai berikut:

Tabel 4.5
Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium

Nama	Golongan	Honorarium	Tarif	Sifat	PPh Terutang
Farianto	IV/a	Rp 2.300.000,00	15%	Final	Rp 345.000,00
Hartanto	III/c	Rp 2.000.000,00	5%	Final	Rp 100.000,00
Bayu	II/d	Rp 1.000.000,00	0%	Final	Rp 0,00
Jumlah					Rp 445.000,00

Sedangkam untuk PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Yugana (Pegawai non PNS) merupakan imbalan peserta kegiatan. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk honorarium yang diterima oleh yugana:

PPh 21 = jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008.

$$\text{PPh 21} = 5\% \times \text{Rp } 1.500.000,00$$

$$= \text{Rp } 75.000,00$$

Dari contoh pemotongan PPh Pasal 21 atas penerimaan honor diatas sesuai dengan penjelasan Aisyah yang mengemukakan bahwa:

“pemotongan PPh 21 PNS dan non PNS atas penerimaan honorarium itu tarifnya beda....itupun PNS setiap golongan juga beda ki tarif yang dikenakan PPh 21, kebetulan.....satu bulan yang lalu disini di adakan workshop dan pematerynya itu ada PNS honoranya dipotong sesuai golongan dan non PNS juga tarif PPh 21 nya beda”

Selanjutnya Aisyah mengatakan bahwa:

“pegawai tetap yang penghasilannya tidak teratur itu dikenakan tarif PPh 21..... ada 0%, 5%, juga 15% seperti yang saya bilang tadi sesuai golongan, penghasilan teratur juga tarifnya beda”

Mengenai pemungutan PPh Pasal 21 Aisyah mengatakan bahwa tarif pemotongan atas penerimaan honorarium PNS dan non PNS berbeda, dan adapun tarif pemotongan PPh Pasal 21 untuk PNS yang dimana penghasilan tidak teratur dikenakan tarif PPh 21 sesuai dengan golongan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa Biringala memahami mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang penghasilannya teratur dan tidak teratur tarifnya berbeda. Sesuai dengan dasar pengenaan PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pegawai Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dengan cara mengurangi jumlah penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan penghasilan neto dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan sebesar 5% dari

penghasilan bruto dengan biaya jabatan maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

2. Pegawai Tidak Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal penghasilan bruto yang dibayar bulanan telah melebihi Rp 4.500.000,00 dalam sebulan, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- b. Dalam hal penghasilan bruto sehari atau penghasilan bruto rata-rata sehari telah melebihi Rp 450.000,00 namun akumulasi penghasilannya dalam sebulan kurang dari Rp 4.500.000,00 dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah sebesar Rp 450.000,00
- c. Penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari lebih dari Rp 450.000,00 atau akumulasi penghasilannya dalam sebulan telah lebih dari Rp 4500.000,00, tetapi tidak lebih dari Rp 10.200.000,00, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP harian sejumlah hari kerja yang sebenarnya.
- d. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender melebihi Rp 10.200.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17

ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

- e. Sedangkan atas penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp 450.000,00 dan akumulasi penghasilannya sebulan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Adapun mengenai objek pemotongan PPh 21 atas upah yang diterima oleh tenaga kerja berdasarkan hasil wawancara dengan Aisyah menjelaskan:

“saya pernah bayar upah tenaga kerja harian sebesar Rp100.000 per hari tapi yang bersangkutan juga 1 minggu ji kerja di sini, biasa nya saya juga bingung dipotong atau tidak.....tapi kan akumulasi nya dalam 7 hari itu di anggap sj satu bulan tidak sampai 4,5 saya pikir memang tidak dipotong PPh 21”

Dari pernyataan yang diberikan oleh Aisyah yaitu dalam pembayaran upah kepada tenaga kerja harian apabila akumulasi upah yang diterima dalam sehari tidak melebihi Rp450.000,00 dan dalam tujuh hari akumulasi penghasilannya tidak melebihi Rp4.500.000,00 maka bendahara tidak memotong PPh Pasal 21 atas upah yang diterima oleh tenaga kerja harian tersebut.

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa beliau paham mengenai adanya pemotongan PPh pasal 21 atas upah tenaga kerja harian, karena sesuai ketentuan perpajakan apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp 450.000,00 dan akumulasi penghasilannya dalam sebulan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dikenakan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang dengan tarif 1,5% dari penghasilan bruto seperti pembelian: komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak/penyedia barang. Adapun yang dikecualikan dari pemotongan PPh 22 yaitu transaksi dibawah Rp 2.000.000 dan tidak dipecah-pecah.

Bendahara Madrasah Aliyah Negeri (MAN) memiliki NPWP melakukan transaksi pembelian makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat seharga Rp 800.000,00. Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh Pasal 22, tetapi karena nilai pembeliannya tidak melebihi Rp 2.000.000,00 maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Aisyah yang mengatakan bahwa:

“setiap pembelian barang, perlengkapan kantor dikenakan ki PPh Pasal 22 itu kalau pembelian nya diatas 2 juta dan tarifnya 1,5% beda juga itu tarifnya kalau tidak punya NPWP, makanya kalau kita disini mau belanja barang untuk keperluan kantor tidak sembarang ditempati toko apalagi kalau untuk transaksi yang sampai jutaan..... kita usahakan selalu yang punya NPWP karena kalau yang tidak punya NPWP tarif nya lagi lebih tinggi, lebih susah lagi pungut PPh 22 ”

Selanjutnya Aisyah mengatakan bahwa:

“kendala memotong PPh 22 kalau belanja barang itu susah kalau bukan toko langganan... jadi kalo mau belanja barang di toko bukan langganan pasti karna terpaksa juga transaksi nya tidak sampai jutaan ji”

Sedangkan Menurut Nasrullah yaitu Rekanan penyedia Barang juga memberikan pernyataan yang mendukung Pernyataan Aisyah sebagai berikut:

“kalau pembeliannya di atas 2 juta itu memang bendahara desa biringala pungut PPh 22 tarifnya 1,5%.... karena beliau juga sudah langganan di sini kita juga sudah senang jadi kita disini tidak pernah ji tidak mau dipotong PPh 22”

Pernyataan Aisyah bahwa setiap pembelian barang yang melebihi Rp 2.000.000,00 dikenakan tarif PPh Pasal 22 yaitu 1,5% dan apabila pengusaha tempat bendahara belanja barang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan tarif normal PPh Pasal 22. Hal tersebut membuat bendahara tidak asal memilih pengusaha penyedia barang apalagi yang tidak mempunyai NPWP karena semakin tinggi tarif PPh 22 yang dikenakan oleh pengusaha penyedia barang maka akan semakin sulit bendahara memungut PPh 22 atas pembelian barang.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan Bendahara Desa biringala disimpulkan bahwa beliau telah memahami berapa tarif pemungutan PPh Pasal 22 dan telah memahami ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat 3 UU 36 Tahun 2008 bila rekanan penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP, maka dikenakan lebih tinggi yaitu sebesar 3% dan apabila rekanan penyedia barang/jasa memiliki NPWP tarif yang dikenakan atas pembelian barang sebesar 1,5% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Selanjutnya Aisyah menjelaskan bahwa:

“baru-baru ini waktu beli bahan material bangunan untuk perbaikan kantor tidak sekaligus dibeli semua.... tergantung dari apa yang dibutuhkan material nya untuk hari ini..... jadi kalau ternyata besok nya masih ada yang kurang baru kita beli lagi, kan itu bahan nya kita beli sedikit-sedikit sesuai kebutuhan dulu biayanya sekitar ratusan jadi saya tidak potong ji PPh 22”

Dari hasil wawancara dengan Aisyah dapat diketahui bahwa terkadang bendahara jika ingin belanja bahan material untuk perbaikan bangunan hanya membeli seperlunya saja untuk digunakan, dimana pada saat pembelian tidak memerlukan pemungutan PPh Pasal 22 dalam artian tidak melebihi Rp 2.000.000,00.

Berdasarkan keterangan yang diberikan bendahara Desa Biringala beliau telah memahami bahwa apabila pembelian barang tidak melebihi Rp 2.000.000 tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Lebih lanjut lanjut lagi pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan dalam hal:

1. Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
2. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;
3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pelunasan pajak melalui pemotongan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut, seperti atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/ penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana yang diatur PMK NOMOR 141/ PMK 03/2015. PPh Pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto. Pemotongan dilakukan oleh Bendahara Desa Biringala sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah tertuang di atas. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Aisyah sebagai berikut:

“PPh Pasal 23 itu 2% untuk sewa dan jasa.... biasanya kita disini memakai jasa katering kalau ada rapat..... biayanya itu sekitar Rp 800.000,00 langsung di kali 2% ji.... kalau diatas Rp 1.000.000 tidak dikenakan PPN, diserahkan mi ke pajak daerah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Aisyah menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 digunakan untuk pemotongan atas penyerahan jasa katering untuk keperluan rapat dengan tarif 2%. Sedangkan PPN digantikan dengan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 10% karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, katering ditetapkan tidak dikenakan PPN.

Dari pernyataan Bendahara Desa Biringala dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah memahami mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan UU 36 tahun 2008 tentang PPh yaitu:

1. Tarif 15% (lima belas persen) untuk objek pajak berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21.
2. Tarif 2% (dua persen) untuk objek pajak berupa sewa atas penggunaan harta (selain sewa tanah dan bangunan) serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.
3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi dari tarif normal. Tarif dikenakan dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Selanjutnya Aisyah juga menjelaskan:

“saya pernah sewa peralatan-peralatan untuk renovasi bangunan kebetulan yang saya tempati dulu sebagai rekanan tutup ki jadi sewa di tempat lain, dan saya jelaskan kalau biaya sewa harus dipotong pajak tapi dia tidak mau dipotong pajak karena harga sewa yang dia terima juga sedikit ji dan karena kita juga mendadak dan butuh terpaksa tidak dipotong”

Dari penjelasan Aisyah di atas mengungkapkan bahwa mereka kesulitan ketika pihak yang bukan rekanannya dia tempati menyewa, mereka tidak mau dipotong pajak atas penghasilannya karena akan mengurangi pendapatannya. Hal

tersebut menjadi kendala bendahara ketika ingin memotong PPh Pasal 23, masih ada pihak penyedia barang / jasa masih enggan dan masing kurang kesadarannya untuk membayar pajak.

Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) merupakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final seperti: (1) persewaan tanah/ bangunan, (2) penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan, (3) pembebasan PPh final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Aisyah yang mengatakan bahwa:

“PPh Pasal 4 ayat (2) pajak final tarifnya 10% untuk sewa tanah, saya memang belum pernah memotong/ memungut pajak tersebut..... karena kebetulan juga saya baru-baru jadi bendahara di sini, mungkin bendahara yang sebelumnya yang biasa memotong PPh Pasal 4 ayat (2)”

Dari Pernyataan Aisyah yaitu pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sehubungan bendahara masih terbilang baru menjabat sebagai bendahara di desa biringala beliau juga masih perlu lebih dalam memahami pemotongan/ pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).

Sebagaimana tarif PPh Pasal 4 ayat 2 tentang pajak final, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan KMK-120/ KMK.03/2002 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atas Penghasilan dan Persewaan

Tanah dan/atau Bangunan, penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah:

1. Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.
2. Besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak orang pribadi maupun Badan.
3. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan /terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya dan *service charge* (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misalnya pembelian barang atau jasa yang menjadi objek PPN seperti alat tulis kantor, pembelian seragam, pembelian komputer, dan perolehan jasa. secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/ rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari

pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara apabila pembayaran tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sebagaimana hasil pernyataan yang diberikan oleh Aisyah yaitu:

“PPN itu dipungut 10% kalau lebih dari 1.000.000..... kalau seperti pembayaran listrik, jasa katering itu tidak dikenakan PPN ji”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Aisyah sesuai dengan KMK No. 563/KMK.03/2003, pemungutan atas PPN yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yaitu sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya melebihi dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun jumlahnya terpecah-pecah dengan tarif 10%. Selanjutnya Aisyah juga mengatakan bahwa:

“kalau PPN itu saya masih bingung karena saat membeli barang dari PKPdi nota nya itu tercantum harga yang harus dibayar dan juga sudah tercantum PPN, itu juga yang buat saya ragu memungut PPN apalagi kalau toko tersebut PKP dia pasti setor sendiri pajak”

Pernyataan Aisyah didukung oleh pernyataan salah satu rekanan, yaitu:

“kan setiap konsumen membeli apapun disini kita cantumkan di struk ada PPN 10% kalau bendahara juga yang pungut pajak kita yang rugi karna kita juga setor sendiri pajak”.

Dari hasil wawancara tersebut Aisyah masih bingung ketika ingin memungut PPN atas pembelian JKP/BKP dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena bisa saja rekanan tersebut menyetorkan PPN nya sendiri apalagi pengusaha tersebut sudah dikukuhkan sebagai PKP disebabkan PKP tersebut mempunyai kewajiban memungut dan menyetor pajaknya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewajiban Bendahara pemerintah memungut PPN tercantum dalam

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang PPN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah) sebagaimana telah beberapa kali diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: “Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek Bea Materai. Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea materai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan.

Sebagai contoh diadakannya rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda menunjuk CV Santap Siang yang bergerak di bidang jasa katering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Nilai kontrak yang disepakati untuk jasa katering adalah sebesar Rp 3.500.000,00. Bendahara Pemda membayar tagihan katering. Jadi, dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: Rp 3.000,00 di setiap

bukti pembayaran yang nilai transaksinya sebesar Rp 250.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 dan Rp 6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp 1.000.000,00. Berdasarkan dengan transaksi yang dikenakan Bea Meterai tersebut di dukung dengan penjelasan Aisyah yaitu:

“untuk Bea Meterai itu dikenakan materai Rp3000 untuk transaksi Rp250.000 s/d Rp1000.000 dan materai Rp6000 kalau diatas Rp1000.000..... setiap bukti pembayaran dikenakan bea materai”

Selanjutnya Aisyah juga menjelaskan:

“setiap tahun memang ada di siapkan dari APBD..... materai nya memang selalu kita bawa kalau mau transaksi, jadi masalah Bea Meterai itu tidak pernah ji kesulitan”

Hasil wawancara dengan Aisyah tersebut dapat simpulkan bahwa ketika ingin membeli keperluan kantor atau belanja barang dan jasa bendahara selalu menyediakan Materai karena di setiap pembuatan dokumen kontrak dan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dokumen atau bukti pembayaran yang memuat jumlah uang:

1. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai.

2. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).
3. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Materai dengan Tarif sebesar Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

3. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya adalah menyetorkan PPh dan/atau PPN melalui sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*) dan/atau layanan pada loket/teller pada Kantor Pos, bank devisa, atau bank penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar sesuai batas waktu yang telah diatur. Sesuai hasil wawancara oleh Bendahara Desa Biringala mengatakan bahwa:

“hasil pemungutan dan pemotongan pajak saya setorkan dengan Surat Setoran Pajak melalui Kantor Pos paling lambat..... tanggal 10 untuk PPh 21 dan 23, PPh 22 paling lama 7 hari setelah pemungutan”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jadwal penyetoran pajak yang dipungut dan dipotong Bendahara Desa Biringala sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03//2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yaitu Bendahara Pemerintah diwajibkan menyetorkan PPh dan PPN melalui sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*) atau layanan pada loket/ teller pada Kantor Pos, bank devisi atau bank penerima pembayaran yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi terkait pelaporan pajak Aisyah menjelaskan bahwa:

“kalau pelaporan pajak saya waktu awal nya masih bingung dan kurang mengerti dan sekarang sudah biasa melapor itupun juga masih dibantu sama teman..... dan karena sekaligus PPh dan PPN dilaporkan, ada yang terlambat pelaporannya”.

Selanjutnya Aisyah mengatakan:

“pelaporannya itu dengan SPT di kantor Pelayanan Pajak ”

Berdasarkan pernyataan tersebut Aisyah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan hasil pemungutan dan pemotongan pajaknya, akan tetapi mengenai waktu pelaporan bendahara masih kurang paham dengan batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bendahara desa telah melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan SPT Masa PPh dan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar. Akan tetapi bendahara terkadang telambat melaporkan pajak disebabkan tanggal pelaporan PPh dan PPN berbeda.

C. Kendala-kendala penghambat bendahara desa dalam pelaksanaan

kewajiban perpajakan

Secara umum, pemungutan/ pemotongan pajak Bendahara Desa telah sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku. Namun masih ada beberapa kendala Bendahara Desa dalam pelaksanaan pemungutan/ pemotongan pajak dan juga

termasuk pelaporannya. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan para responden.

Terjadinya perubahan peraturan yang sangat cepat di bidang perpajakan, yang apabila Bendaharawan tidak cepat beradaptasi menyebabkan terlambat mengikuti perubahan informasi tersebut. Dengan diterbitkannya berbagai macam aturan perundang-undangan di bidang perpajakan dewasa ini menuntut bendaharawan untuk lebih aktif mengikuti dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang berubah agar tepat perhitungan besarnya pajak yang harus mereka bayar Hal tersebut di ungkapkan hasil wawancara dengan Aisyah:

“kendala nya itu kalau peraturan cepat berubah apalagi..... terlambat dapat informasi dan di desa ini jarang ada sosialisasi padahal itu juga penting supaya kita bisa bertanya tentang peraturan pajak yang sulit dipahami”.

Selanjutnya Aisyah juga mengatakan:

“pada saat belanja barang itu susah memungut pajak kalau pihak yang ditempati bukan langganan dia tidak mau penghasilannya dipotong pajak mungkin juga karena kurang sosialisasi dan pengawasan”.

Dari hasil wawancara tersebut hal lain yang menjadi penentu tentang kelancaran pemungutan dan pemotongan pajak adalah faktor sosialisasi atau semacam Bimtek (Bimbingan teknis). Jika sosialisasi dilakukan secara rutin maka perhatian masyarakat (rekanan) atas kewajiban pajak semakin tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Bendahara Desa terkait kewajiban perpajakan termasuk pemotongan/ pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai dan penyetoran pajak telah di pahami dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun adanya kendala mengenai waktu pelaporan pajak disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan yang diperoleh Bendahara Desa Biringala termasuk kendala pada saat Bendahara desa ingin memotong/memungut pajak masih ada pihak yang ditempati bertransaksi masih tidak patuh mengenai pemotongan/ pemungutan pajak.
2. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pemotongan/ pemungutan pajak serta pelaporan pajak Bendahara Desa yang ditemui yakni masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha disebabkan karena keengganan Wajib Pajak yang bersangkutan dan sistem pengawasan dari pemerintah/ fiskus tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya:

1. Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak sehingga Bendahara pemerintah sebagai pihak ketiga (*withholder*) yang diberikan wewenang memungut dan memotong pajak yang dananya berasal dari APBN, APBD atau APBDes diwajibkan mengetahui terkait peraturan perpajakan.
2. Dengan adanya berbagai macam belanja barang dan jasa dari Bendahara pemerintah dapat meningkatkan omzet para pelaku usaha dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan negara, diharapkan perlunya ditingkatkan pengawasan untuk para pelaku usaha. .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Agusta, Ivanovich. Pengumpulan Analisis data Kualitatif. 2014

Ajzen, Icek, 1991, The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 50, pp. 179-211.

Allingham, Michael G., Agnar Sandmo, 1972, "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics*, Vol. 1, pp. 323-338.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia*. 2010

Direktorat Jendral Pajak, *Bendahara Mahir Pajak*, Edisi Revisi, Tim Penyusun Direktorat Jendral Pajak. Jakarta Selatan. 2016

Donaldson, Lex., dan James H. Davis. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns*. Australian Journal of Management. Volume 16: Hlm 49-56.

Feld, Lars P. Bruno S. Frey, 2002, "Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated", *Economics of Governance*, Vol. 3.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press

Herryanto, Marisa dan Agus Arianto. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Jurnal Tax dan Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013.

Kholis, Nur. 2010. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya Di Indonesia. *Makalah Diskusi Ilmiah Terbatas "Hukum Islam Di Indonesia"*, Diselenggarakan Oleh Program Pascasarjana Fiai Doktor Hukum Islam.

Kiki, Nurul. "Malpraktek Pemotongan dan pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.3 No.3*. 2012

Marisa, Agus. 2013. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratam Surabaya Sawahan.

Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muchlis, Mustakim. *Kewajiban Pajak Bendahara Pemerintah : Tantangan Dalam Penerapannya*. 2015
- Pravitasari, Narita, Wirawan Endro Dwi R., dan Vierly Ananta Upa. *Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojekerto*. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol.1 No. 2012
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Desain Penelitian Kualitatif dan Contoh Proses penelitian Kualitatif*. [online] Di akses pada tanggal 28 Maret 2016.
- Raharjo, Eko. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. ISSN: 1907. Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1: Halm 37-46.
- Ratnafuri, Kiki dan Nurul Herawati. *Mal Praktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahrawan Pemerintah*. *Jurnal Multiparadigma*. 2012
- Rosalina, Santi. 2010. *Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus Of Control dan Gender*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Septiani, Aditya. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang*. Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan. Hal 13-14.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soeradi. *Bendaharawan Pemerintah, Optimalisasi Tugas dan Perannya Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak*. 2014
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Thun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.



TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dilakukan kepada Bendahara Desa dan Masyarakat. Wawancara kepada Bendahara Desa dan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan pajak di Desa, baik dari segi pemahaman Bendahara Desa, hal-hal yang menjadi kendala, maupun hal-hal lain terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wawancara kepada Bendahara Desa dilakukan untuk mendapatkan informasi pemahaman Bendahara Desa terkait ketentuan perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPN dan bea meterai.

A. Bendahara Desa

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan/ pemotongan pajak di Desa dan berapa tarif pajaknya?

Jawaban:

- a) **Pemotongan PPh Pasal 21:** “pemotongan PPh 21 PNS dan non PNS atas penerimaan honorarium itu tarifnya beda....itupun PNS setiap golongan juga beda ki tarif yang dikenakan PPh 21, kebetulan.....satu bulan yang lalu disini di adakan workshop dan pematernya itu ada PNS honornya dipotong sesuai golongan dan non PNS juga tarif PPh 21 nya beda. pegawai tetap yang penghasilannya tidak teratur itu dikenakan tarif PPh 21..... ada 0%, 5%, juga 15% seperti yang saya bilang tadi sesuai golongan, penghasilan teratur juga tarifnya beda”
- b) **Pemungutan PPh Pasal 22:** “setiap pembelian barang, perlengkapan kantor dikenakan ki PPh Pasal 22 itu kalau pembelian nya diatas 2 juta dan tarifnya 1,5% beda juga itu tarifnya kalau tidak punya NPWP, makanya kalau kita disini mau belanja barang untuk keperluan kantor tidak sembarang ditempati

toko apalagi kalau untuk transaksi yang sampai jutaan..... kita usahakan selalu yang punya NPWP karena kalau yang tidak punya NPWP tarif nya lagi lebih tinggi, lebih susah lagi pungut PPh 22 ”

- c) **Pemotongan PPh Pasal 23:** “PPh Pasal 23 itu 2% untuk sewa dan jasa.... biasanya kita disini memakai jasa katering kalau ada rapat..... biayanya itu sekitar Rp800.000,00 langsung di kali 2% ji.... kalau diatas Rp1.000.000 tidak dikenakan PPN, diserahkan mi ke pajak daerah”
- d) **Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2:** “PPh Pasal 4 ayat (2) pajak final tarifnya 10% untuk sewa tanah, saya memang belum pernah memotong/ memungut pajak tersebut..... karena kebetulan juga saya baru-baru jadi bendahara di sini, mungkin bendahara yang sebelumnya yang biasa memotong PPh Pasal 4 ayat (2)”
- e) **Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai:** “PPN itu dipungut 10% kalau lebih dari 1.000.000..... kalau seperti pembayaran listrik, jasa katering itu tidak dikenakan PPN ji”
- f) **Bea Meterai:** “untuk Bea Meterai itu dikenakan materai Rp3000 untuk transaksi Rp250.000 s/d Rp1000.000 dan materai Rp6000 kalau diatas Rp1000.000..... setiap bukti pembayaran dikenakan bea materai”

2. Apa saja kendala dalam pemungutan/ pemotongan pajak?

Jawaban:

- a) **Pemotongan PPh Pasal 21:** “saya pernah bayar upah tenaga kerja harian sebesar Rp100.000 per hari tapi yang bersangkutan juga 1 minggu ji kerja di sini, biasa nya saya juga bingung dipotong atau tidak.....tapi kan akumulasi nya dalam 7 hari itu di anggap sj satu bulan tidak sampai 4,5 saya pikir memang tidak dipotong PPh 21”
- b) **Pemungutan PPh Pasal 22:** “kendala memotong PPh 22 kalau belanja barang itu susah kalau bukan toko langganan... jadi kalo mau belanja barang di toko bukan langganan pasti karna terpaksa itupun juga transaksi nya tidak sampai jutaan ji”

- c) **Pemotongan PPh Pasal 23:** “saya pernah sewa peralatan-peralatan untuk renovasi bangunan kebetulan yang saya tempati dulu sebagai rekanan tutup ki jadi sewa di tempat lain, dan saya jelaskan kalau biaya sewa harus dipotong pajak tapi dia tidak mau dipotong pajak karena harga sewa yang dia terima juga sedikit ji dan karena kita juga mendadak dan butuh terpaksa tidak dipotong”
- d) **Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai:** “kalau PPN itu saya masih bingung karena saat membeli barang dari PKP di nota nya itu tercantum harga yang harus dibayar dan juga sudah tercantum PPN, itu juga yang buat saya ragu memungut PPN apalagi kalau toko tersebut PKP dia pasti setor sendiri pajak”
- e) **Bea Materai:** “setiap tahun memang ada di siapkan dari APBD, jadi masalah Bea Materai itu tidak pernah ji kesulitan”

3. Apa saja kendala pada saat penyeteroran dan pelaporan pajak di Desa?

Jawaban:

“kalau pelaporan pajak saya waktu awal nya masih bingung dan kurang mengerti dan sekarang sudah biasa melapor itupun juga masih dibantu sama teman..... dan karena sekaligus PPh dan PPN dilaporkan, ada yang terlambat pelaporannya”

4. Bagaimana cara mengatasi kendala atas pelaksanaan pemungutan pajak di

Desa ?

Jawaban:

“kendala nya itu kalau peraturan cepat berubah apalagi..... terlambat dapat informasi dan di desa ini jarang ada sosialisasi padahal itu juga penting supaya kita bisa bertanya tentang peraturan pajak yang sulit dipahami”

“masih perlunya sosialisasi dan pengawasan karena pada saat belanja barang itu susah memungut pajak kalau pihak yang ditempati bukan langganan tidak mau penghasilannya dipotong pajak mungkin juga”

5. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak?

Jawaban:

“penyetoran pajak nya itu di Kanotr Pos atau bisa juga bank devisa menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dan pelaporan pajak itu di Kantor Pajak menggunakan SPT dan masing-masing pajak itu punya batas waktu pelaporannya”

B. Rekanan

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya pemotongan pajak atas penghasilan yang anda terima?

Jawaban: iya

2. Dari mana anda mengetahui tentang pemotongan pajak ? (jika nomor 1 jawan iya)

Jawaban:

“iya saya tau dari berita, apalagi kan bendahara biasa belanja barang disini dari awal memang dia sudah jelaskan tentang pemungutan pajak PPh Pasal 22 atas pembelanjaan barang”

3. Berapa tarif yang dipotong oleh pemotong/ pemungut pajak (bendahara pemerintah)?

Jawaban:

“Tarifnya itu kan 2% itupun kalau Rp.2000.000,00 keatas”

4. Apakah ada kendala saat penghasilan anda dipotong setelah selesai melakukan transaksi?

Jawaban: “pada umumnya memang ada”

5. Bagaiman anda mengatasi kendala tersebut? (jika no 4 jawab iya)

Jawaban:

“kalau masalah kendala mungkin bisa di bilang karena ada pemungutan pajak bisa mengurangi penghasilan kita, tapi kalau namanya kewajiban dan memang sudah ada peraturan pemerintah kita ikut saja, kalau di langgar lebih panjang lagi masalahnya”



LAMPIRAN 5



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAROMBONG**

Alamat : Jalan Poros Kanjilo, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong

Kanjilo, 2 Februari 2017

Nomor : 070/194/2016
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Desa Biringala
Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Gowa Nomor : 070/080/BKB.P/2017 tanggal 26 Januari 2017 Perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nurjidah**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 26 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Emmy Saelan 3 BTN Agrarian Blok T No.8

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Thesis dengan judul **"PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAANNYA"**.

Selama : 23 Januari s/d 23 Februari 2017
Pengikut : Tidak ada

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud, diharapkan bantuan seperlunya

Camat Barombong,

ARY MAHDIN ASFARI, S.STP, M.Si
Pangkat: Pembina
NIP : 19790727 199711 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Gowa cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa
2. Kapolsekta Barombong
3. Danpos Barombong
4. Dekan Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : 40 /EB.I/PP.00.9/2017
Lamp : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 18 Januari 2017

Kepada,

Yth. Kepala UPT P2T BKPM
Prov. Sulawesi Selatan

Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

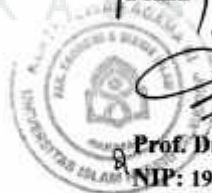
Nama : **Nurjidad**
NIM : 10800112031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX(Sembilan)
Alamat : Jl. Monumen Emmy Saelan

Bermaksud melakukan pra penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya **"Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Tantangan dalam Pelaksanaannya."**

Dengan Dosen Pembimbing: **1. Mustakim Muchlis, SE., M.Si., Ak.**
2. Ahmad Efendi, SE., MM.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.**
Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP: 19581022 198703 1 002

Tembusan :

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 26 Januari 2017

Kepada

Nomor : 070/000/BKB.P/2017

Yth. Camat Barombong

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 492/S.01.P/P2T/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Nurjidah**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 26 Juli 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Emmy Saelan 3 BTN Agraria Blok T No.8

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian skripsi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAANNYA**"

Selama : 23 Januari s/d 23 Februari 2017

Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Peringgal

LAMPIRAN 3



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 492/S.01P/P2T/01/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 401/EB.I/PP.00.9/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURJIDAH**
Nomor Pokok : 10800112031
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAANNYA "

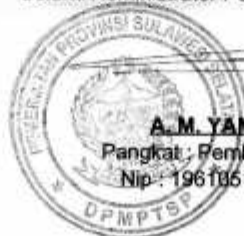
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Januari s/d 23 Februari 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Januari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
2. Peninggal

LAMPIRAN 6



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata -- Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : 092 / EB.I/PP.00.9/2016

Samata, 9 Januari 2017

Lampiran : -

Hal : Undangan Seminar Proposal
A.n. Nurjidah/10800112031

Kepada Yth:

1. **Mustakim Muchlis, SE., M.Si.** Sebagai Pembimbing I
2. **Ahmad Efendi, SE., MM.** Sebagai Pembimbing II

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

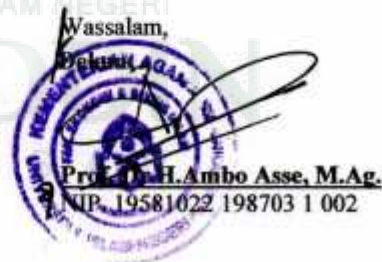
Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 11 Januari 2017
Waktu	: 09.00 - Selesai
Judul Skripsi	: Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Tantangan dalam Pelaksanaannya 9Studi Desa di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa)
Tempat	: Ruang Seminar Lt. II

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



Wassalam,
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir

LAMPIRAN 7



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 588 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN Akuntansi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Nurjidah**, Nims: **10800112031** tertanggal **11 Mei 2016** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Tantangan dalam Pelaksanannya**"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Mustakim Muchlis, SE., M.SI., Ak.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
2. **Ahmad Efendi, SE., M.M.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 16 Mei 2016



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurjidah, dilahirkan di Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada Tanggal 26 Juli 1994 sebagai anak ketiga dari enama bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak H. Sabaruddin Garancang dan dan HJ. ST.Hudayah.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Bustanul Athfa yang diselesaikan pada Tahun 2000, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Dasar di SD Inpres BTN IKIP 1 dan tamat pada tahun 2006, melanjutkan studi Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Puteri UMMUL MUKMININ Makassar yang diselesaikan pada Tahun 2009, dan lanjut Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sungguminasa yang diselesaikan pada Tahun 2012.

Pada Tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Pembentukan fakultas baru tahun 2014 dan dipindahkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur tertulis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PTAIN (SPMB-PTAIN).